

ANALISI PENERAPAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAPORAN DANA APBNSalsabilla Julia Hamida¹, M. Luthfillah Habibi²¹² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya,
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
e-mail: billasalsa689@gmail.com¹, ismiluthfi@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada penerapan SAKTI di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, terutama di bagian keuangan. SAKTI, yang merupakan sistem pengelolaan keuangan wajib bagi semua instansi pemerintah pusat sejak tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan SAKTI pada efektivitas dan efisiensi pelaporan dana APBN. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan SAKTI dalam pelaporan keuangan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SAKTI terletak pada kemampuannya dalam proses pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran hingga pelaporan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan secara online, real-time, dan lebih cepat, sehingga mengurangi kesalahan manusia. Efisiensi SAKTI tercermin dari optimalisasi penggunaan sumber daya, memberikan manfaat bagi Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Dirjen Jenderal Perbendaharaan, dan KPPN. Aplikasi berbasis web ini juga memberikan fleksibilitas, memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan tepat waktu.

Kata kunci: APBN, Efektivitas, Efisiensi, SAKTI, SIA, SIAP

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sistem informasi memiliki peran yang krusial dalam organisasi. Seiring perkembangan zaman, sistem informasi akuntansi berbasis komputer telah diciptakan untuk memberikan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh penggunanya. Sistem ini mempermudah pengguna untuk meninjau laporan keuangan dengan akurat dan cepat, yang sangat memudahkan. Saat ini, penyedia sistem informasi akuntansi menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengguna menjalankan sistem keuangan mereka. Organisasi sektor publik, mulai dari pemerintah daerah hingga desa, kini menggunakan sistem informasi keuangan. Di era globalisasi, teknologi informasi berkembang pesat, baik di sektor perusahaan maupun pemerintahan, yang mulai beralih ke aplikasi berbasis teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Aplikasi ini memfasilitasi pengelolaan dana dalam pelaporan keuangan instansi, sehingga memudahkan pelaksanaan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, diperlukan sistem atau aplikasi untuk memastikan pengelolaan keuangan dapat direncanakan dengan baik, karena lembaga memiliki tanggung jawab besar terhadap anggaran yang diberikan. Laporan keuangan yang direncanakan dan terealisasi dengan baik menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga publik (Nasution & Nasution, 2022). Menanggapi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan menciptakan sistem aplikasi terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat yang menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di seluruh Indonesia, yang disebut Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). (Amriani & Iskandar, 2019).

Setelah dibentuknya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk meningkatkan dan memperlancar operasional perbendaharaan negara di sisi BUN, pemerintah kemudian menciptakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menyempurnakan IFMIS di tingkat unit. Penerapan SAKTI secara penuh mulai diwajibkan untuk seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat sejak tahun 2022 (Gultom & Harahap, 2024). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2021, yang mengharuskan penggunaan aplikasi ini secara menyeluruh dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara (Zaenudin, Negoro, Pandaya, & Suprpta, 2024). Mengusung prinsip single entry point, SAKTI mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan melalui satu basis data yang terpusat. SAKTI dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBN dengan mengintegrasikan seluruh proses keuangan negara, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Melalui aplikasi ini, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan manual dalam pelaporan serta memastikan data yang dihasilkan lebih akurat dan tersedia secara real-time.

Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang keamanan dan pelayanan publik, menjadi lokasi penelitian ini. Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan susunan komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kota Surabaya. Penelitian ini berfokus pada Seksi Keuangan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Di tingkat Polres, Seksi Keuangan (Sikeu) merupakan bagian pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang keuangan dan berada di bawah Kapolres. Menurut Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, fungsi keuangan seperti pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan merupakan tugas dan tanggung jawab sikeu. Pada sisi keuangan Polres Pelabuhan Tanjung Perak pernah mendapatkan penghargaan dari KPPN mengenai penyeteroran LPJ tercepat secara lengkap dan benar serta beberapa kali mendapatkan peraih IKPA (Indikator Kinerja Penilaian Anggaran) terbaik secara empat tahun berturut-turut.

Dalam melakukan tugasnya seksi keuangan pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya didukung oleh teknologi aplikasi keuangan yaitu SAKTI yang didalamnya terdapat pencatatan laporan keuangan yang berbasis akuntansi akrual secara tepat dan akurat. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga menggunakan SAKTI secara elektronik untuk semua transaksi.

Dengan adanya aplikasi keuangan seperti SAKTI, dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan, pada kualitas dalam laporan keuangan mampu menyediakan informasi yang lebih akurat dan mampu memenuhi kriteria standar akuntansi keuangan dan kesalahan pada proses dari penyusunan laporan keuangan dapat diminimalisir. Aplikasi SAKTI memudahkan dalam pencatatan laporan keuangan pengelolaan dana APBN yang diberikan pemerintah salah satunya pada instansi Kepolisian Republik Indonesia dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.

2. Tinjauan Pustaka

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi dengan tujuan menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi keputusan manajemen. SIA memadukan teknologi informasi dengan praktik akuntansi, sehingga mempermudah pengelolaan transaksi keuangan, pencatatan, pembuatan laporan, serta analisis data keuangan. Sistem ini mengelola formulir, catatan, dan laporan untuk memberikan wawasan keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajerial serta mempermudah pengelolaan perusahaan. Sistem ini terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan perlu berkolaborasi agar dapat menghasilkan laporan yang efektif (Endaryati, 2021). Sistem Informasi Akuntansi mencakup serangkaian prosedur, formulir, catatan, dan alat yang dirancang untuk memproses data

keuangan menjadi laporan yang membantu manajemen dalam mengawasi operasi perusahaan dan sebagai landasan dalam membuat keputusan (Marina, Wahjono, Syaban, & Suarni, 2017).

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Pada instansi pemerintahan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) yang merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mencatat semua transaksi keuangan serta menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. SIAP dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan pemerintah yang efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SIAP berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan keuangan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, SIAP disebut sebagai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAPP merupakan kumpulan prosedur dan berbagai unsur yang sistematis untuk mendukung fungsi akuntansi, mulai dari pengumpulan dan pencatatan data, hingga pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dengan tujuan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (PMK No. 271, 2022).

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola dan memproses data keuangan secara terpadu dan efisien di instansi pemerintah. Sistem ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan pada tingkat instansi, dengan tujuan memastikan pencatatan setiap transaksi keuangan secara tepat dan transparan. Satuan kerja dalam pemerintahan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk mendukung penerapan SPAN dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Entitas akuntansi dan pelaporan di Kementerian Negara/Lembaga menggunakan aplikasi ini, dan semua transaksi dilakukan secara elektronik. SAKTI menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Transaksi dalam SAKTI terjadi dari Januari hingga Desember, termasuk tahap unaudited dan audit.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER, dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap tahapan pengelolaan keuangan didukung oleh modul-modul aplikasi berikut (KPPN Kuala Tunggal, n.d.):

1. Proses penganggaran dilakukan melalui modul Penganggaran.
2. Beberapa modul mengatur pelaksanaan. Ini termasuk modul Komitmen yang memiliki submodul Manajemen Pelanggan dan Submodul Manajemen Komitmen, modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran..
3. Proses pelaporan dilakukan melalui modul GL dan Pelaporan.

Aplikasi SAKTI memiliki banyak fitur, termasuk *Single Entry Point*, *Integrasi Database*, tingkatan pengguna (*Maker*, *Checker*, dan *Approver*), dukungan *Multi User Multi Satker*, kompatibilitas dengan SPAN, penerapan *Access Control List (ACL)*, akuntansi berbasis akrual secara transaksional, penguncian transaksi, fitur *Open-Closing Period*, antarmuka ADK (terenkripsi, *hashed*, dengan PIN), 14 periode akuntansi (*Unaudited dan Audited*), serta pencatatan data historis dan log transaksi (Anwar & Hadi, 2022).

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah setiap tahun dan kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran ini mencakup perkiraan pendapatan yang akan diterima pemerintah serta alokasi pengeluaran yang akan dialokasikan dalam periode tertentu, biasanya selama satu tahun fiskal. APBN berfungsi sebagai instrumen penting dalam perencanaan keuangan negara untuk mendukung berbagai program, proyek, dan kegiatan yang didanai negara, serta

memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. APBN berperan sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara guna mendukung operasional pemerintahan serta pembangunan ekonomi. Tujuan utama APBN adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Efektivitas Pelaporan

Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan melalui upaya atau tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, efektivitas menilai seberapa berhasil suatu proses atau kegiatan dalam menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin efektif suatu tindakan, semakin tinggi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu tindakan dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan atau target sesuai dengan yang telah direncanakan (Martauli S, Andri, Apriansah, Kamaludin, & Juriani, 2022). Efektivitas pelaporan dana APBN merujuk pada kemampuan pelaporan anggaran untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu terkait penggunaan dana publik. Pelaporan yang baik harus disajikan dengan jelas, dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, serta mematuhi aturan. Pelaporan yang efektif mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal dan pencapaian tujuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi Pelaporan

Efisiensi adalah perbandingan antara kondisi normal dengan keadaan di mana menggunakan sumber daya minimal untuk menghasilkan output yang sama seperti biasanya atau sesuai dengan yang diharapkan. Alternatifnya, efisiensi dapat terjadi ketika keluaran yang dihasilkan lebih banyak dari biasanya tanpa ada sumber daya yang terbuang dalam proses tersebut (Nonnie, n.d.). Efisiensi pelaporan dana APBN merupakan usaha untuk mengurangi penggunaan sumber daya dalam proses pelaporan anggaran, namun tetap mencapai hasil yang optimal. Pelaporan harus dilakukan dengan cepat, akurat, sesuai aturan, dan tetap mempertahankan kualitas informasi. Efisiensi ini membantu menghindari pemborosan waktu serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan dan kesejahteraan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan masalah secara rinci dan memahami peristiwa atau fenomena melalui pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Daerah yang digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Polisi Tanjung Perak di Surabaya, yang terletak di Jalan Kalianget No.1 di Surabaya. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, metode ini melibatkan pengamatan lapangan untuk mengetahui implementasi SAKTI di Kantor Polisi Pelabuhan Tanjung Perak, di Surabaya. Selain itu, wawancara dilakukan di Kantor Polisi Tanjung Perak di Surabaya, wawancara ini ditujukan langsung kepada responden. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari buku, majalah, internet, dll. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mereduksi data dengan cara merangkum dan mengkategorikan permasalahan yang diteliti, hal ini akan membantu peneliti untuk memfokuskan pada temuan-temuan yang dianggap paling penting bagi penelitian, dan juga akan memudahkan pemahaman terhadap data-data yang diperoleh. Data-data tersebut disajikan sebagai kumpulan informasi yang memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap penelitian yang sedang dilakukan, hal ini dilakukan dengan hanya memberikan informasi yang diperlukan saja dan membuang informasi-informasi yang tidak

relevan, hal ini menghilangkan kebutuhan untuk membaca keseluruhan penelitian. Pada tahap akhir, peneliti menyusun temuan-temuan penelitian mengenai implementasi aplikasi SAKTI di Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

4. Hasil dan Pembahasan

Sistem akuntansi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh unit kerja untuk memfasilitasi penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam pengelolaan keuangan negara, yang meliputi tahap perencanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran (KPPN Kuala Tunggal, n.d.). Dengan adanya aplikasi keuangan seperti SAKTI dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, meningkatkan kualitas laporan dengan menyediakan informasi yang lebih akurat, serta memenuhi standar akuntansi keuangan. Selain itu, kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat diminimalkan. Aplikasi SAKTI juga memfasilitasi pencatatan laporan keuangan terkait pengelolaan dana APBN yang diberikan oleh pemerintah, termasuk untuk instansi Kepolisian Republik Indonesia dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan dana APBN yang baik dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan keuangan, serta memastikan bahwa anggaran yang telah diberikan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan laporan yang disampaikan.

Sebelum diterapkannya SAKTI di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, pengelolaan keuangan dilakukan secara terpisah menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang sering menghambat proses pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh setiap satuan kerja (satker) Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang harus mengirimkan ADK (Arsip Data Komputer) langsung ke KPPN. Selain itu, pengelolaan keuangan mengharuskan pemindahan ADK antara beberapa aplikasi, yang menyebabkan duplikasi data dan memakan waktu lama. Biaya untuk menyediakan database juga cukup besar. Satker juga harus datang langsung ke KPPN untuk mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta harus menunggu lama saat KPPN sedang ramai pengunjung.

Penerapan SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan di satker Polres Pelabuhan Tanjung Perak dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mengutamakan prinsip ketepatan waktu, dan tetap mematuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Efektivitas SAKTI terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan laporan yang akurat dan dapat diandalkan secara tepat waktu. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, sistem ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang biasanya terkait dengan akuntansi manual. Selain itu, SAKTI memungkinkan akses data secara real-time, sehingga pengguna dapat membuat keputusan keuangan secara cepat. Pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif melalui satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup seluruh siklus keuangan negara, mulai dari penganggaran hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Efisiensi penerapan SAKTI terletak pada penggunaan sumber daya secara tepat, termasuk tenaga, biaya, dan waktu, sebagai input dalam implementasi SAKTI untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat, tidak hanya bagi Dirjen Perbendaharaan dan KPPN, tetapi juga bagi Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Indikator efisiensi ini mencakup optimalisasi sumber daya, baik dari segi anggaran keuangan maupun sumber daya non-keuangan, dalam mendukung penerapan SAKTI.

Pengelolaan operasional keuangan negara menjadi lebih efektif dan efisien melalui penggunaan satu aplikasi perangkat lunak, yaitu SAKTI, yang mencakup seluruh siklus keuangan negara, mulai dari penganggaran hingga pelaporan. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan seperti pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pembayaran (SPP), pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta pelacakan penerimaan dan pengeluaran negara. SAKTI berbasis web, sehingga pengguna tidak perlu mengunduh atau

memperbarui sistem secara berkala, dan sistem ini tersedia di berbagai perangkat dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Satker Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga dapat memantau proses pelaporan keuangan secara langsung melalui akses online, memudahkan manajemen dalam menerapkan prinsip kepatuhan pelaporan keuangan, yang berbeda dari sistem sebelumnya sebelum adanya SAKTI.

Seperti pada saat mengirimkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan LPJ (laporan pertanggung jawaban), sebelum adanya SAKTI satker sie keuangan harus datang secara langsung ke KPPN dan harus mengantre lama sampai sehabis saat KPPN sedang ramai pengunjung. Setelah menggunakan SAKTI di Polres pelabuhan Tanjung Perak satker sie keuangan tidak perlu datang ke KPPN. Dengan menggunakan SAKTI, pembuatan dan pengiriman SPM dan LPJ dapat dilakukan dalam waktu kurang lebih satu jam.

Dengan adanya SAKTI satker sie keuangan dapat dengan mudah membuat dan mengirimkan LPJ dan SPP (Surat Perintah Pembayaran). Sie keuangan membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebelum batas waktu yang ditentukan tanggal 10 setiap bulan. Dalam pembuatan surat perintah pembayaran (SPP) untuk gaji Sie keuangan melakukan setiap tanggal 5 setiap bulan sebelum batas waktu yang ditentukan tanggal 17 setiap bulan. Oleh karena itu, sie keuangan Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan penghargaan dari KPPN mengenai penyeteroran LPJ tercepat secara lengkap dan benar serta beberapa kali mendapatkan peraih IKPA (Indikator Kinerja Penilaian Anggaran) terbaik secara empat tahun berturut-turut.

Kendala yang dihadapi dalam penggunaan SAKTI adalah minimnya ketersediaan jaringan dan lambatnya akses masuk ke sistem. Lambatnya akses sering terjadi di awal bulan, saat seluruh unit kerja melakukan realisasi belanja pegawai secara bersamaan. Selain itu, jika terdapat kesalahan penginputan melalui aplikasi SAKTI tidak dapat diperbaiki/direvisi. Sakter harus melapor ke pihak KPPN bahwa terjadi kesalahan dalam penginputan data. Selanjutnya pihak KPPN melaporkan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan return. Setelah menerima laporan tersebut Kementerian Keuangan menerbitkan berita acara kepada Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

5. Simpulan

Penerapan SAKTI di Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Sebelum adanya SAKTI, pengelolaan keuangan menggunakan berbagai aplikasi terpisah yang memakan waktu dan biaya serta sering terjadi duplikasi data. Efektivitas SAKTI terletak pada kemampuannya dalam proses pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran hingga pelaporan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan secara online, real-time, dan lebih cepat, sehingga mengurangi kesalahan manusia. Efisiensi SAKTI tercermin dari optimalisasi penggunaan sumber daya, memberikan manfaat bagi Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Dirjen Jenderal Perbendaharaan, dan KPPN. Aplikasi berbasis web ini juga memberikan fleksibilitas, memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan tepat waktu. Namun, masih ada kendala terkait lambatnya akses jaringan dan ketidakmampuan merevisi kesalahan input data.

Daftar Referensi

- 271, P. N. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2022*, 136, 1–136. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240215/pmk-no-217pmk052022>
- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Kajian Ekonomi & Keuangan Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan*, 1(September), 74.
- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi Aplikasi Sakti Dan Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2), 32–55. <https://doi.org/10.57094/ji.v1i2.359>
- Endaryati, E. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. (I. A. Dianata, Ed.), *Yayasn Prima Agus Teknik*. Semarang: Yayasn Prima Agus Teknik.

- Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. *Owner*, 8(1), 300–313. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846>
- KPPN Kuala Tunggal. (n.d.). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Retrieved October 21, 2024, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/titian/sakti.html>
- Marina, A., Wahjono, S. I., Syaban, M., & Suarni, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*. UMSurabaya Publishing. Surabaya: UMSurabaya Publishing.
- Martauli S, H. ., Andri, Apriansah, D., Kamaludin, & Juriani, T. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 4(2), 113–128. <https://doi.org/10.48093/jiask.v4i2.82>
- Nasution, R. N. A., & Nasution, J. (2022). Penerapan Aplikasi Sakti Dalam Pengelolaan Keuangan Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera. *Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship*, 3(1), 5–8. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i1.172>
- Nonnie, V. (n.d.). Efisiensi Bukti Finansial Dalam Pembuatan Laporan Keuangan Di PT Sinar Berlian Gemilang, 1–11.
- Zaenudin, Negoro, A., Pandaya, & Suprpta, I. (2024). Implementasi Aplikasi Sakti Kementerian Keuangan Pada Kinerja KPU. *Balance Vacation Accounting Journal*, (60), 101–116.